



BADAN POM RI

LAPORAN KINERJA (LAKIN) 2017

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDA ACEH

P B P O N

email : [serikat@yahoo.com](mailto:serikat@ yahoo.com), alif_rid@yahoo.co.id, website : www.pom.go.id / sipoma.net @ppomaceh @ppomaceh @ppomaceh

PIMPINAN DAN STAF BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Selamat Datang

KEPALA BADAN POM RI & ROMBONGAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

BANDA ACEH, 16 OKTOBER 2017

DR. Ir. Penny K. Luthi, MCF
Kepala Badan POM RI

DR. Zulkifli, Apt
Kepala Balai Besar Aceh

BADAN POM RI



TIM PENYUSUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

(Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
Nomor : HK.06.02.81.12.17.3292 tanggal 22 Desember 2017

Menetapkan Kembali
Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2017
Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai Berikut :

Pelindung:
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banda Aceh

Drs. Zulkifli. Apt

Ketua:
Hasnidar, ST.,MT.

Sekretaris:
Marina Kaptriyani, ST.,MT

- Anggota:
1. Dra. Cut SafrinaIndriawati, Apt., M.Kes
 2. Dra. Effiyanti, Apt, M.Si
 3. NurlindaLubis, Apt., M. Si
 4. Sri wardono. S. Si,, Apt., M. Si
 5. Desi Ariyanti Ningsih, S. Si., Apt
 6. SuryaniFauzi, SKM, M. Si
 7. Martantri Dwi Nugrahani, S. TP, M. Biotech
 8. Dahliana Effendi, S.Si
 9. Liza Tiara, S.Farm.,Apt
 10. Yuna Ningsih, S.Si.,Apt, M. FoodSt
 11. Arief Budi Harta, S.Farm. Apt
 12. Listra Vera Duma Sirait, S.Si.,Apt
 13. EndangYuliawati, SKM
 14. Fita Sarafina, SE
 15. NaniYusraini, S.Si
 16. Naila. S. Si., Apt
 17. Sriwijayanti, A.Md
 18. YuyunYunia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan LAKIN tahun 2017 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN BBPOM di Banda Aceh tahun 2017 merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, serta sebagai dasar untuk upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan. Pergeseran keadaan lingkungan strategis sebagai dampak peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, berubahnya minat konsumen, kemudahan transportasi dan kemajuan teknologi produksi dapat mempengaruhi arah dan sasaran strategis sehingga mengubah prioritas dalam menyusun strategi pengawasan setiap tahun, terutama pada penyelenggaraan peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia.

Hasil kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh di wilayah Provinsi Aceh pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan efektivitasnya dibanding dengan hasil

pengawasan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun untuk mengetahui manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, cara yang lebih objektif perlu dilakukan survey secara kontinyu ke masyarakat. Keberhasilan pengawasan Obat dan Makanan tidak hanya menjadi tanggung jawab Balai Besar POM di Banda Aceh semata, namun sangat tergantung oleh terbangunnya komitmen dengan lintas sektor yang memiliki wewenang dan kewajiban melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat diterima sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2017 dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.



Banda Aceh, 04 Januari 2018

Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Drs. Zulkifli, Apt

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH' around the perimeter. The signature is written in a cursive style.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN / i

KATA PENGANTAR / iv

DAFTAR ISI / vi

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 / vii

IKHTISAR EKSEKUTIF / viii

BAB-I

PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum Organisasi / 2
- 1.2. Aspek Strategis Organisasi / 6
- 1.3. Analisis Lingkungan Strategis / 7
- 1.4. Isu Strategis / 12

BAB-II

PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis / 16
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 / 24
- 2.3 Kriteria Pencapaian Indikator / 26

BAB-III

AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2017 / 30
- 3.2. Analisis Capaian Kinerja / 33
- 3.3. Realisasi Anggaran / 57
- 3.4 Analisis Efisiensi Kegiatan / 59



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

BADAN POM

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya sistem Pengawasan Obat & Makanan	1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98
		2. Persentase Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat	80
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92
		4. Persentase Suplemen Kesehatan Yang Memenuhi Syarat	82
		5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	89
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	98
		2. Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	15
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya Kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2700
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	43
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan	10
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi, dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/ BPOM	555
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	26
Meningkatnya Kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	85
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh

Kepala Badan POM RI



Anggaran

Rp. 23.238.148.000

Banda Aceh, 06 Januari 2017
Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Banda Aceh merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandate termasuk aspek penggunaan anggaran. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi terhadap target dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang telah disepakati kedua belah pihak.

Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2015- 2019 telah menetapkan 6 indikator kinerja utama (IKU), dengan

capaian untuk Tahun 2017 sebagai berikut: (*lihat halaman selanjutnya*)

Capaian indikator kinerja tahun 2017 tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari DIPA tahun 2016 dimana realisasi anggaran sebesar **Rp. 20,485,814,181,-** atau **92.08%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 22,247,409,000,-**.

Keberhasilan atau kegagalan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mencapai target kinerja dapat dinilai dari capaian pada indikator kinerja dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

99.5%

1. Presentase obat yang memenuhi syarat.

81.1%

2. Presentase obat tradisional yang memenuh syarat.

99.0%

3. Presentase Kosmetik yang memenuhi syarat.

98.5%

4. Presentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat.

86.6%

5. Presentase Makanan yang memenuhi syarat.

87,35%

6. Tingkat kepuasan masyarakat.

16 KAB/KOTA

7. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan.



BAB - I

PENDAHULUAN





BADAN POM RI

PRESS CONFERENCE

Hasil Operasi Gabungan Nasional
Perantasan Obat dan Makanan Ilegal di Provinsi Aceh

oleh :

Kepala Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banda
Drs. Zulkifli, Apt

KEPALA BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA



1.1.

Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Provinsi Aceh.

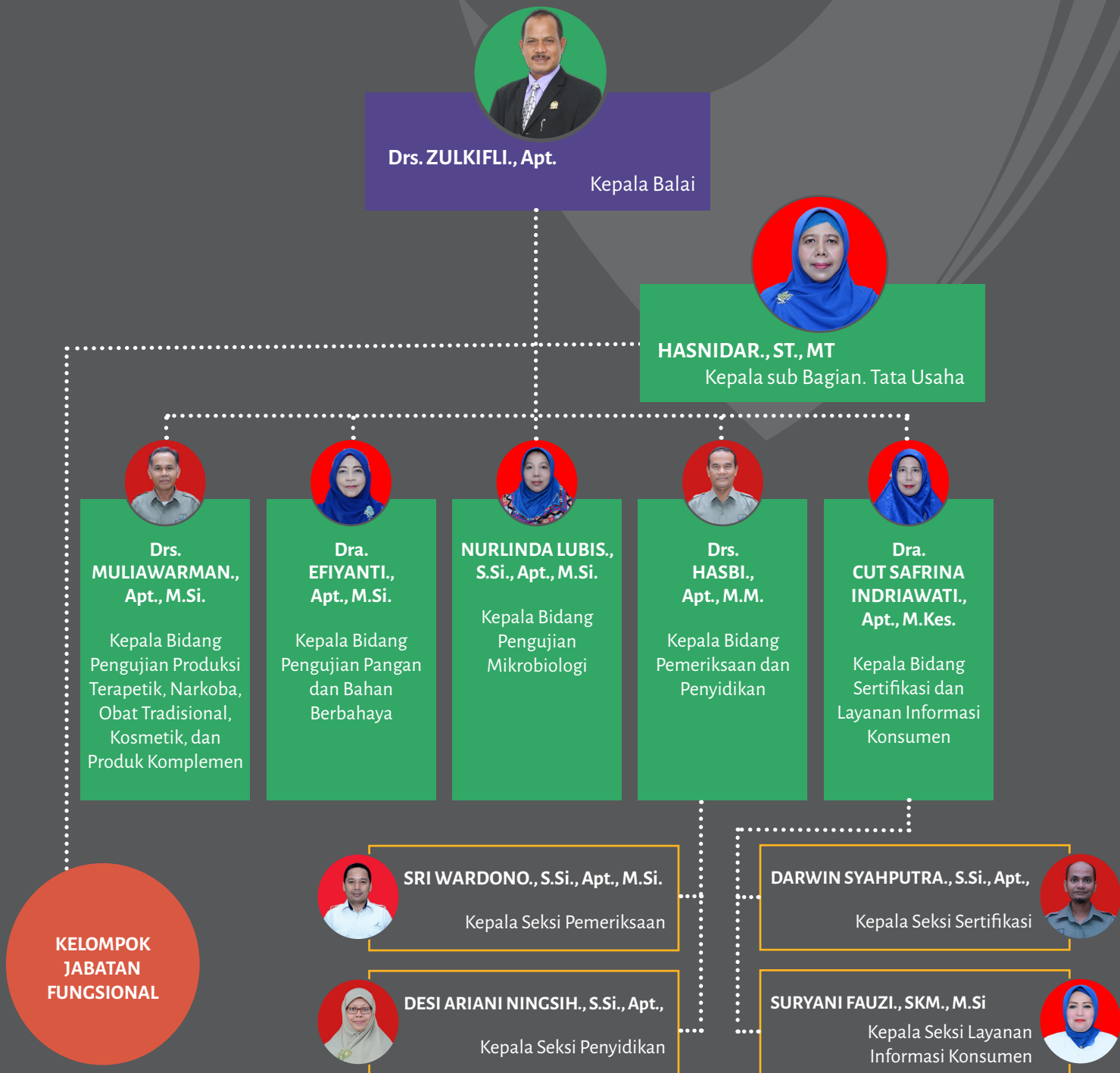
Berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk.H.Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23126, Telp. (0651) 7411698 – 23926, Fax.(0651) 22735, 22845. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, BBPOM di Banda Aceh mempunyai tugas berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Fungsi dan Tanggung jawab Badan POM, untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Balai Besar POM di Banda Aceh menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan produk Obat dan Makanan di Provinsi Aceh.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, PKRT, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya di Provinsi Aceh.
3. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi di Provinsi Aceh.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum dibidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, PKSSRT, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya di Provinsi Aceh
6. Pelaksanaan rekomendasi dalam rangka registrasi produk, audit keamanan pangan dalam rangka pemenuhan persyaratan registrasi produk, dan audit pemberian sertifikat piagam bintang keamanan pangan.
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian produk obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI, sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh



1. Bidang pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Psikotropika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen	Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen.
2. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya	Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya
3. Bidang Pengujian Mikrobiologi	Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.

TUGAS POKOK & FUNGSI

- 4. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan** Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari 2 (dua) seksi dengan tugas sebagai berikut :
- a. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
 - b. Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

5. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari 2 (dua) seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.
- b. Seksi Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.

6. Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.

MASING-MASING BIDANG & SUB BAGIAN

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Farmasi dan Makanan, Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu keahlian lainnya..

1.2.

Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana dalam visi dan misi pembangunan nasional periode 2015-2019, pemerintah dalam rangka mewujudkan visi tersebut dibuatlah 7 (tujuh) misi pembangunan nasional, yang salah satunya adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

Visi-misi ini selanjutnya dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang disebut Nawa Cita. Badan POM RI pada umumnya dan BBPOM di Banda Aceh pada khususnya, dalam visi dan misinya mendukung Nawa Cita ke-5 yaitu:



Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui pengawasan obat dan makanan.

Dalam Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019, BPOM termasuk dalam 2 (dua) bidang yaitu :

- 1 Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama – Sub bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dan
- 2 Bidang Ekonomi- Sub bidang UMKM dan Koperasi.

1.3.

Analisis Lingkungan Strategis

A. Internal

1. Pegawai

Jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh per 31 Desember 2017 adalah 93 orang, terdiri dari 77 orang PNS dan 16 orang tenaga Pramubakti (lihat grafik).

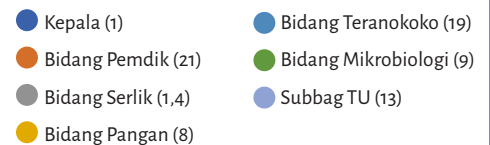
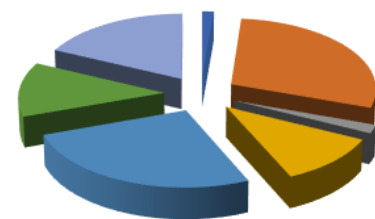
2. Sarana dan Prasarana

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki gedung dan laboratorium sendiri, listrik dari PLN dengan daya sebesar 53 KVA dan 41.5 KVA dilengkapi genset 200 KVA, 9 unit kendaraan dinas, peralatan dan instrumen modern seperti PCR, AAS, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatografi Gas, GC-MS, Spectrofotometer, ELISA dll. BBPOM di Banda Aceh telah tersertikasi ISO 9001: 2016, OHSAS 18001:2008 dan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025: 2005.

3. Anggaran

Anggaran awal BBPOM di Banda Aceh untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal untuk Tahun 2017 berjumlah Rp. 23.238.148.000,- Kemudian terjadi pemotongan untuk penghematan. Anggaran BBPOM di Banda Aceh menjadi Rp. 22.247.409.000,-, mengalami kenaikan 7,49% dari tahun 2016 (Rp. 20.697.773.000,-).

Distribusi Pegawai
BBPOM di Banda Aceh



Kualifikasi Pendidikan
Pegawai BBPOM
di Banda Aceh



B. Eksternal

1. Luas Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ}58' 37,2''$ – $06^{\circ} 04' 33,6''$ LU dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ – $98^{\circ} 17' 13,2''$ BT dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut.

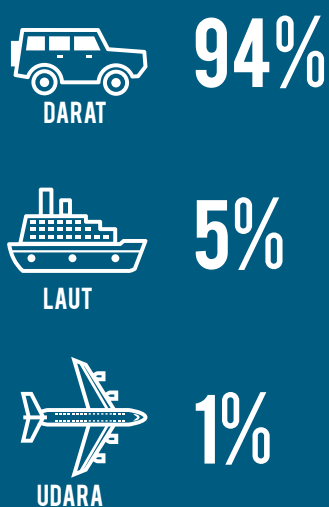
Batas wilayah : Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Barat dengan Samudera Indonesia.



Luas Daerah	: 56.770,81 Km ²	Jumlah Kabupaten	: 18
Lautan	: 15.264,06 Km ²	Jumlah Kota	: 5
Pulau	: 119 buah	Jumlah Kecamatan	: 289
Sungai	: 73 buah	Jumlah Mukim (Kelurahan)	: 779
Danau	: 2 buah	Jumlah Gampong (Desa)	: 6474
Gunung	: 35 buah	Penduduk	: 4.597.308 jiwa
ZEE	: 238.807 km ²	Kepadatan	: 81 jiwa/km ²

2. Pola Transportasi Di Wilayah Kerja

Untuk mencapai lokasi kerja, petugas Balai Besar POM di Banda Aceh menggunakan transportasi sebagaimana grafik dibawah ini :



Luas Daerah	: 56.770,81 Km ²
Lautan	: 15.264,06 Km ²
Pulau	: 119 buah
Sungai	: 73 buah
Danau	: 2 buah
Gunung	: 35 buah
ZEE	: 238.807 km ²

Dengan lama waktu perjalanan kewilayah kerja Kabupaten/Kota

Rata – rata	: 14 jam
Paling lama	: 25 jam
Paling singkat	: 2 jam

Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan

No	Kabupaten /Kota	PBF	Apotek	TOB	RS	PKM	Klinik	Ritel Pangan	Produsen Garam	PAK	Cab. PAK	Obat Trad	Kosm	Jumlah
1	Aceh Barat	-	14	26	3	13	2	51	-	1	-	12	19	141
2	Aceh Barat Daya	-	9	34	1	13	-	64	-	-	-	16	15	152
3	Aceh Besar	7	14	72	5	28	5	151	4	2	-	21	77	386
4	Aceh Jaya	-	2	6	1	10	3	57	-	-	-	6	18	103
5	Aceh Selatan	-	7	35	1	23	2	41	-	-	-	15	24	148
6	Aceh Singkil	-	8	7	1	11	-	32	-	-	-	8	9	76
7	Aceh Tamiang	-	20	32	1	14	3	65	-	-	-	12	21	168
8	Aceh Tengah	-	14	28	2	14	1	59	-	-	-	16	18	152
9	Aceh Tenggara	-	20	44	1	18	-	20	-	-	-	7	5	115
10	Aceh Timur	-	15	29	4	26	2	54	2	1	-	16	34	183
11	Aceh Utara	-	7	62	3	31	-	64	4	-	-	32	31	234
12	Banda Aceh	18	84	60	15	11	10	375	-	36	3	37	177	826
13	Bener Meriah	-	5	38	3	13	-	28	-	-	-	23	18	128
14	Bireuen	-	26	34	4	18	1	81	2	-	-	20	59	245
15	Cayo Lues	-	5	6	1	12	-	19	-	-	-	5	11	59
16	Langsa	1	28	21	4	5	1	57	-	1	-	16	25	159
17	Lhokseumawe	1	28	22	5	6	1	63	-	1	-	16	26	169
18	Nagar Raya	-	5	4	1	14	1	35	-	-	-	5	11	76
19	Pidie	-	15	63	3	26	-	108	6	1	-	36	28	286
20	Pidie Jaya	-	6	26	1	11	-	47	5	-	-	20	15	131
21	Sabang	-	7	7	2	6	1	53	-	-	-	5	22	103
22	Simelue	-	5	7	1	12	-	11	-	-	-	6	7	49
23	Subulussalam	-	4	9	1	5	2	30	-	-	-	6	5	62
JUMLAH		27	348	672	64	340	35	1565	23	43	3	356	675	4151

Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan

No	Kabupaten/Kota	Produsen Pangan MD		Produsen UKOT	IRTP	JUMLAH
		Produsen AMDK	Produsen Non AMDK			
1	Aceh Barat	-	-	1	31	32
2	Aceh Barat Daya	5	-	1	17	23
3	Aceh Besar	5	-	-	54	59
4	Aceh Jaya	-	-	2	-	2
5	Aceh Selatan	1	-	-	89	90
6	Aceh Singkil	1	-	-	15	16
7	Aceh Tamiang	-	-	-	21	21
8	Aceh Tengah	-	-	-	39	39
9	Aceh Tenggara	2	-	-	-	2
10	Aceh Timur	-	-	1	6	7
11	Aceh Utara	1	-	3	17	21
12	Banda Aceh	1	3	-	220	224
13	Bener Meriah	2	-	-	43	45
14	Bireuen (AMDK + Garam)	1	1	1	20	23
15	Gayo Lues	1	-	-	-	1
16	Langsa	4	-	-	54	58
17	Lhokseumawe	3	-	-	134	137
18	Nagar Raya	1	-	-	2	3
19	Pidie	9	-	1	32	42
20	Pidie Jaya	-	-	-	1	1
21	Sabang	-	-	-	45	45
22	Simelue	-	-	-	40	40
23	Subulussalam	1	-	-	81	82
JUMLAH		38	4	10	961	1013

1.4.

Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai *internal issue* adalah

1 Belum bebasnya pangan jajanan dari bahan berbahaya (borax dan formalin) terutama mie basah dan kerupuk tempe.



2 Masih ditemukan produk Kosmetik dan OT yang sudah tercantum dalam *public warning* dijual dipasaran.



3 Masih terdapat peredaran Obat-Obat Tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, palsu dan tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan



4 Masih lemahnya komitmen Pemda dalam menindak lanjuti hasil pengawasan yang disampaikan.



5 Pelabuhan Krueng Geukuh di Aceh Utara sebagai jalur masuk kedua bagi produk impor selain Pelabuhan Sabang di Banda Aceh dapat menjadi peluang meningkatnya peredaran produk obat, obat tradisional, kosmetik, dan makanan yang ilegal.



6 Dengan diberlakukannya syariat Islam di Provinsi Aceh, maka Balai Besar POM di Banda Aceh diharapkan melakukan pengawasan bersama dengan MPU Aceh (LPPOM MUI) terkait peredaran makanan yang halal.



BAB - II

PERENCANAAN KINERJA





2.1

Rencana Strategis

Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh merupakan rencana kegiatan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Badan POM RI 2015-2019.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017 Balai Besar POM di Banda Aceh merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh 2015-2019. RKT memuat tujuan strategis, sasaran strategis, dan perjanjian kinerja. Dalam mencapai tujuan strategis, ditetapkan sasaran strategis. Setiap sasaran strategis Balai Besar POM di Banda Aceh dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan

perspektif yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Rencana strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Banda Aceh, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Banda Aceh. Dalam periode waktu 5 tahun ke depan (2015-2019) diharapkan Balai Besar POM di Banda Aceh dapat merealisasikan rencana strategis tersebut.



Dalam perencanaan strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) diharapkan Balai Besar POM di Banda Aceh akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS

1

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh merupakan suatu proses yang komprehensif terdiri dari:

- a. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukansampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan.
- b. Pengujian laboratorium. Produk Obat dan Makanan yang disampling berdasarkan tingkat risiko kemudian diuji melalui pengujian laboratorium untuk mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan produk yang tidak memenuhi syarat dan kemudian akan ditarik dari peredaran.
- c. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terkait keamanan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum melalui *projusticia* dapat ditindaklanjuti secara hukum



pidana dan berakhir dengan sanksi pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional.

Sasaran strategis 1 berfungsi mengawal tugas BBPOM di Banda Aceh dalam hal melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat. Badan POM menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang telah dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh. Sasaran strategis 1 ini diukur dengan 5 (lima) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, yaitu:

1.

Persentase obat yang memenuhi syarat (MS) dengan target 99% pada akhir tahun 2019



Diukur berdasarkan jumlah produk obat yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah seluruh obat yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan

- » Obat (obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narotika) mendapatkan NIE dari Badan POM
- » MS ditetapkan melalui pengujian laboratorium
- » Kategori obat disampling sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan
- » Produk obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets

2.

Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat dengan target 82% pada akhir tahun 2019



Diukur berdasarkan jumlah obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dibandingkan dengan total obat tradisional yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan

- » Obat tradisional mendapatkan NIE dari Badan POM
- » MS ditetapkan melalui pengujian laboratorium
- » Kategori obat tradisional yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan

3.

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat dengan target 94% pada akhir tahun 2019



Diukur berdasarkan jumlah kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dibandingkan dengan total kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

- » Kosmetik mendapatkan notifikasi dari Badan POM
- » MS ditetapkan melalui pengujian laboratorium
- » Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan

4.

Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat dengan target 84% pada akhir tahun 2019



Diukur berdasarkan jumlah suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dibandingkan dengan total suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan

- » Suplemen kesehatan mendapatkan NIE dari Badan POM
- » MS ditetapkan melalui pengujian laboratorium
- » Kategori suplemen kesehatan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.

5.

Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 90% pada akhir tahun 2019



Diukur berdasarkan jumlah makanan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah seluruh sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan

- » Makanan (pangan olahan) mendapatkan NIE dari Badan POM
- » MS ditetapkan melalui pengujian laboratorium
- » Kategori pangan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling

SASARAN STRATEGIS

2

Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari tiga subsistem yaitu: produsen, pemerintah (BPOM dan lintas sektor) dan masyarakat sebagai konsumen. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik. Produsen mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, bermanfaat, dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan. Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan harus didukung dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas. Salah satunya adalah dengan memberikan dukungan regulatory (sistem pengawasan) kepada pelaku usaha dengan intensif.

Masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu dengan berperan aktif untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, salah satunya melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan, serta komunikasi, layanan informasi, dan edukasi (KIE) yang dilaksanakan oleh BPOM.

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan sistem pengawasan Obat dan Makanan, BPOM di Banda Aceh menjalin kerjasama dengan lintas sektor, antara lain Pemerintah Daerah, Asosiasi Pelaku Usaha, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2, maka dibuat indikatornya adalah:

1.

Tingkat Kepuasan Masyarakat, dengan target 98% pada akhir 2019



Diukur berdasarkan hasil survei lapangan

- » Penilaian kualitas pelayanan hasil survei Kepuasan Masyarakat
- » Mengacu pedoman terkini (PermenPAN No. 16 tahun 2014)

2.

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, dengan target 23 kabupaten/kota pada akhir 2019

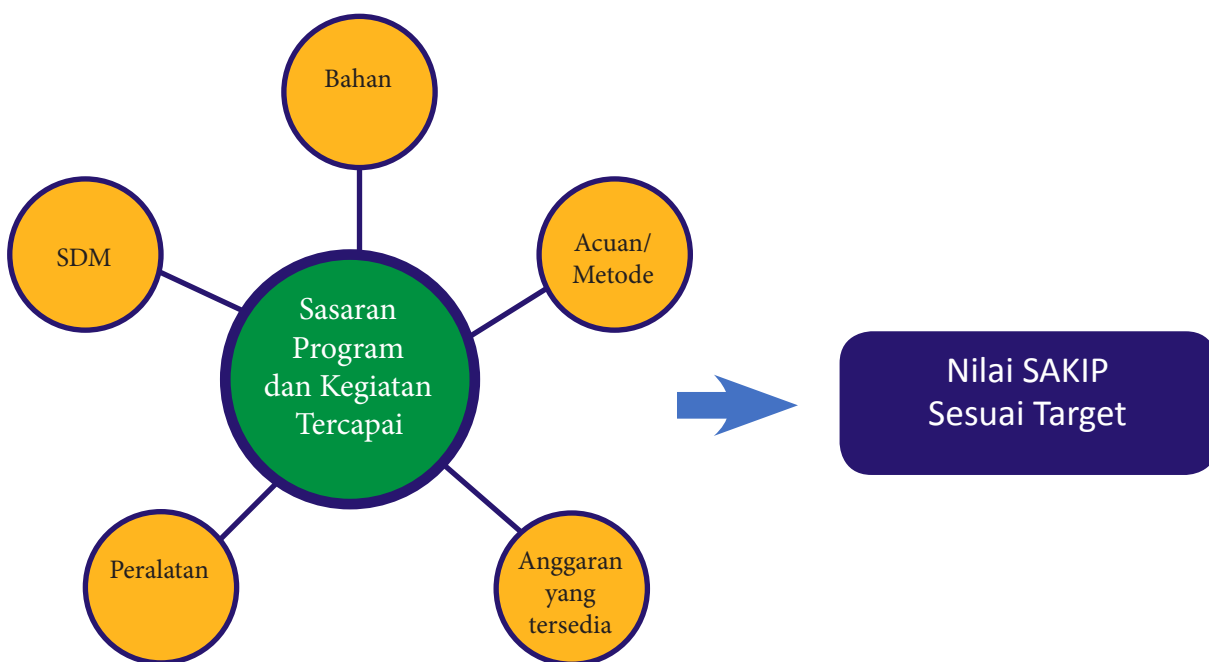


Dihitung dari hasil rekapitulasi matriks pemantauan pengalokasian anggaran Pemda untuk Pengawasan Obat dan Makanan

- » Perjanjian Kota/Kabupaten untuk melaksanakan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu

Sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumberdaya yang terbatas mengharuskan BPOM mampu mengelola sumber daya

tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.



BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*) namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*) yang masih memerlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3

berupa hasil penilaian SAKIP BBPOM di Banda Aceh oleh BPOM, dengan target nilai A pada akhir 2019. Nilai SAKIP merupakan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Balai yang dilakukan oleh APIP Badan POM.

Adapun program, sasaran program, kegiatan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh periode waktu 5 tahun ke depan (2015-2019) dapat dilihat pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1. Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Kegiatan dan Indikator

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Banda Aceh	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis 2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) 3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan 4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan 5. Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan 6. Jumlah layanan publik BBPOM di Banda Aceh 7. Jumlah komunitas yang diberdayakan 8. Jumlah sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan 9. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

2.2.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis BBPOM di Banda Aceh Tahun 2015-2019. Perjanjian kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.2.



TABEL 2.2. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2017

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	98
		2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	80
		3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	92
		4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	82
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	89
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat kepuasan masyarakat meningkat	98
		2. Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	15
3.	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2700
		2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Presentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	63
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Presentase cakupa pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	43
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah perkara obat dan makanan	10
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi, dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BBPOM di Banda Aceh	555
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	26
Meningkatnya kapasitas kelembagaan Balai Besar Pom di Banda Aceh			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	85
2	Penyusunan, perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan:

Pengawasan Obat dan Makanan di
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh

Anggaran :

Rp 23.238.148.000.-

2.3

Kriteria Pencapaian Indikator

2.3.1. Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran dengan lebih dari 2 indikator diberikan pembobotan terhadap masing-masing indikator yang ditentukan berdasarkan kontribusi indikator tersebut dalam pencapaian sasaran. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$NPS = (\text{Bobot} \times \text{capaian indikator 1}) + (\text{Bobot} \times \% \text{ capaian indikator 2}) \text{ dst..}$$

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja menggunakan kriteria yang telah

ditetapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut :

No.	Kriteria	Capaian Target Indikator
1.	Memuaskan	$100 \% \leq x \leq 125 \%$
2.	Baik	100 %
3.	Cukup	$75 \% \leq x < 100 \%$
4.	Kurang	$x < 75\%$
5	Tidak dapat disimpulkan	$X > 125 \%$

2.3.2. Pengukuran Efisiensi dan Efektifitas Kinerja

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan, maksudnya adalah mengukur kemampuan suatu kegiatan dengan menggunakan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau persentase

capaian output lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Nilai maksimum dari SE adalah 1, dan digunakan sebagai indeks efisiensi, dihitung menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100 \%}{100 \%} = 1 \end{aligned}$$

Untuk mengukur apakah suatu kegiatan dinyatakan efisien atau tidak efisien, digunakan formula logika sebagai berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Derajat efisiensi atau disebut Tingkat Efisiensi (TE) merupakan pernyataan seberapa jauh/ tinggi tingkat efisiensi kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Rumus untuk menghitung tingkat efisiensi setiap kegiatan dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efektivitas kegiatan adalah derajat/tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui derajat efektivitas perlu diketahui pencapaian indikator outcome. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut

selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa waktu (dalam satuan tahun) setelahnya. Pengukuran tingkat efektivitas sifatnya masih berdasarkan angka bukan realisasi yang dirasakan oleh masyarakat luas.

BAB - III

AKUNTABILITAS





3.1.

Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2017

Keberhasilan capaian kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2017 dapat dilihat dari nilai pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2015-2019.

Berikut ini adalah ringkasan pencapaian ketiga sasaran strategis tersebut., yang dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$\text{NPS} = (\text{Bobot} \times \text{capaian indikator 1}) + (\text{Bobot} \times \% \text{ capaian indikator 2}) \text{ dst...}$$

Pencapaian indikator sasaran ke-1 dan ke-2 bersifat relatif dan merupakan hasil rata-rata dari beberapa indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dimiliki Balai Besar POM di Banda Aceh diukur dengan indikator kinerja, dan dikatakan “berhasil” jika capaian masing masing indikator memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun tingkat capaian kinerja Balai POM Banda Aceh pada Tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya terhadap **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.1. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

No	Sasaran Strategis	NPS (%)	Kriteria
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	114.20%	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	95.35%	Cukup
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	74.97%	Cukup

SASARAN STRATEGIS 1

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Banda Aceh

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 5 indikator yang termasuk **Indikator Kinerja Utama (IKU)** *Balai Besar POM Banda Aceh yaitu:

No	Indikator	Realisasi	Target	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat *	99,5%	98,00%	101,49%	Memuaskan
2.	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat *	81,8%	80,00%	102,30%	Memuaskan
3.	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat *	99,0%	92,00%	107,64%	Memuaskan
4.	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*	98,5%	82,00%	120,17%	Memuaskan
5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat*	86,6%	89,00%	97,30%	Cukup

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator dimana satu indikator termasuk IKU yaitu :

No	Indikator	Realisasi	Target	% Capaian	Kriteria
1	Tingkat kepuasan masyarakat *	87,35%	98,00%	89,13%	Cukup
2	Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan tahun 2016 yaitu berjumlah 10 kab/kota.	16	15	106,67%	Baik

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM di Banda Aceh

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator sebagai berikut :

No	Indikator	Realisasi (tahun 2015)	Target	% Capaian	Kriteria
1	Nilai SAKIP	B	A	74.97%	Cukup



3.2.

Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka memberikan informasi mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis Balai Besar POM di Banda Aceh pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran strategis 1 (SS1) ini merupakan sasaran strategis yang berfungsi mengawal tugas Balai Besar POM di Banda Aceh dalam hal melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat dan berdaya saing. Tercapainya SS1 diukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu 1) Persentase obat yang memenuhi syarat, 2) Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, 3) Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, 4) Persentase suplemen makanan yang memenuhi syarat, dan 5) Persentase makanan yang memenuhi syarat. Capaian masing – masing IKU yang mendukung SS1 ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

Tercapainya SS1 diukur dengan **5 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

yaitu:

1. Persentase obat yang memenuhi syarat,
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat,
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat,
4. Persentase suplemen makanan yang memenuhi syarat, dan
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat.

IKU 1.1. Presentase Obat Yang Memenuhi Syarat

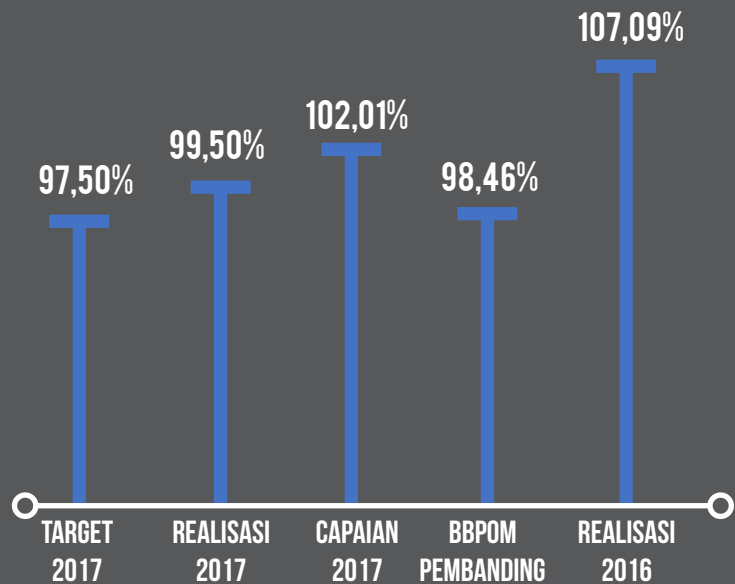
~

IKU 1.1 merupakan indikator kinerja yang bertujuan untuk mengawal mutu obat sehingga produk obat yang beredar di Wilayah Aceh adalah produk obat yang memenuhi syarat.

Presentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 102.01% dihitung dari jumlah obat yang memenuhi syarat (551 sampel) dibandingkan terhadap jumlah obat yang diuji dengan parameter uji kritis (554 sampel). Sampel Obat Tidak Memenuhi Syarat adalah : 2 sampel TMS Positif DNA Porcine, 1 sampel TMS Kadar Ethynilestradiol

Presentase realisasi IKU 1.1. ini dibandingkan terhadap target Tahun 2017 seperti yang dilustrasikan dalam tabel berikut :

PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT



Realisasi IKU 1.1. pada Tahun 2017 (99.50%) lebih tinggi dari target Tahun 2017 (98.00%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian sampel obat yang diuji dengan parameter kritis (102.01%), BBPOM di Banda Aceh telah memenuhi standar keamanan sehingga dapat disimpulkan capaian indikator tersebut "MEMUASKAN". Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja BBPOM di Banda Aceh telah sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM RI.

Dibandingkan dengan realisasi IKU Tahun 2016 (107.90%) maka realisasi Tahun 2017 (99.50%) mengalami penurunan sebesar 8.40%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Adanya perubahan definisi operasional (DO) dalam perhitungan jumlah obat yang

memenuhi syarat. Pada tahun 2016 Jumlah sampel obat yang memenuhi syarat dihitung terhadap jumlah sampel total yang disampling. Sedangkan pada tahun 2017 perhitungan jumlah sampel obat yang memenuhi syarat dihitung terhadap sampel obat yang diuji menggunakan parameter kritis.

- Kemampuan petugas dalam melaksanakan kebijakan purposive sampling semakin baik.

Perbandingan Realisasi BBPOM Banda Aceh tahun 2017 (99.5%) dengan realisasi BBPOM di Bandar Lampung (98.46%) tidaklah terlalu jauh berbeda dengan kriteria yang sama yaitu Memuaskan. Jika dibandingkan dengan Target Tahun 2017, maka kedua balai ini sudah melampaui target yang ditetapkan.

TABEL 3.2.
Perbandingan Realisasi IKU 1.1. Tahun 2017
terhadap target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019

IKU 1.1	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Realisasi 2017
Persentase obat yang memenuhi syarat	97.00%	97.50%	98.00%	98.50%	99.00%	99.5%

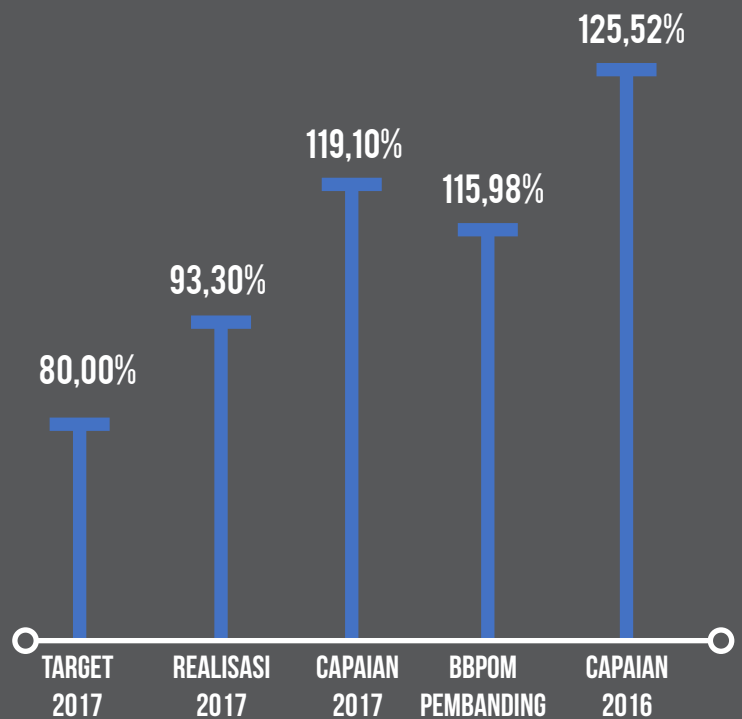
IKU 1.2. Presentase Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat

IKU 1.2 merupakan indikator kinerja yang bertujuan untuk mengawal mutu obat tradisional sehingga yang beredar di Wilayah Aceh adalah produk obat tradisional yang memenuhi syarat.

Presentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 95,3% dihitung dari presentase jumlah obat tradisional yang memenuhi syarat (347 sampel) dibandingkan dengan jumlah obat tradisional yang diuji dengan parameter uji kritis (424 sampel). 77 Sampel TMS terdiri dari : TMS Sineol, Waktu Hancur, Keseragaman Volum, Kadar air, ALT, AKK, Pseudomonas aeruginosa,

Presentase realisasi IKU 1.2. ini dibandingkan terhadap target Tahun 2017 dan target nasional seperti yang diilustrasikan dalam tabel berikut :

PERSENTASE OBAT TRADISIONAL YANG MEMENUHI SYARAT



Realisasi IKU 1.2. pada Tahun 2017 (95.30%) lebih tinggi dari target Tahun 2017 (80.00%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian sampel obat tradisional yang diuji dengan parameter kritis (119.10%) BBPOM di Banda Aceh telah memenuhi standar keamanan sehingga dapat disimpulkan capaian indikator tersebut “MEMUASKAN”. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja BBPOM di Banda Aceh telah sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM RI.

Dibandingkan dengan realisasi IKU Tahun 2016 (99.20%) maka realisasi Tahun 2017 (95.30%) mengalami penurunan sebesar 3.90%. Tetapi

Persentase ini telah memenuhi target sampai tahun 2019. Oleh karena itu perlu dilakukan review atau penyesuaian terhadap target tahunan Renstra 2015-2019 yang harus dicapai BBPOM di Banda Aceh.

Capaian Obat Tradisional yang memenuhi syarat BBPOM di Banda Aceh (119.10%) dibanding dengan balai lain yang setipe yaitu BBPOM di Bandar Lampung (115.98%) tidaklah jauh berbeda dengan kriteria Memuaskan. Kedua Balai mempunyai kecenderungan yang sama yaitu terjadi penurunan realisasi ditahun 2017.

TABEL 3.3.
Perbandingan realisasi IKU 1.2. Tahun 2017 terhadap target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019

IKU 1.2	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Realisasi 2017
Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	79.00%	79.00%	80.00%	81.00%	82.00%	95.3%



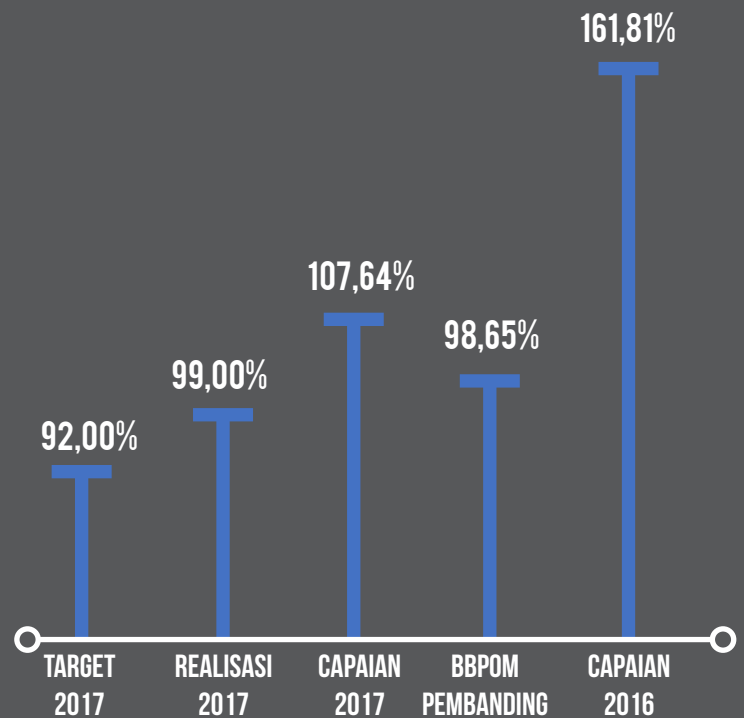
IKU 1.3. Presentase jumlah kosmetik yang memenuhi syarat

IKU 1.3 merupakan indikator kinerja yang bertujuan untuk mengawal mutu kosmetik sehingga produk kosmetik yang beredar dimasyarakat adalah produk kosmetik yang memenuhi syarat.

Presentase kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 99.0% dihitung dari presentase jumlah obat kosmetik yang memenuhi syarat Tahun 2017 (812 sampel) dibandingkan dengan jumlah kosmetik yang diuji dengan parameter uji kritis Tahun 2017 (820 sampel). 8 Sampel Kosmetika yang Tidak Memenuhi Syarat : 8 ALT, 5 AKK, 1 Pseudomonas aeruginosa.

Presentase realisasi IKU 1.3. ini dibandingkan terhadap target Tahun 2017 dan target nasional seperti yang dilustrasikan dalam tabel berikut :

PERSENTASE KOSMETIKA YANG MEMENUHI SYARAT



Realisasi IKU 1.3. pada Tahun 2017 (99.00%) lebih tinggi dari target Tahun 2017 (92.00%). Hal ini menunjukkan bahwa % capaian sampel kosmetik yang diuji dengan parameter kritis (107.64%) BBPOM di Banda Aceh telah memenuhi standar keamanan sehingga dapat disimpulkan capaian indikator tersebut “MEMUASKAN”. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja BBPOM di Banda Aceh telah sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM RI.

Dibandingkan dengan realisasi IKU Tahun 2016

(147.20%) maka realisasi Tahun 2017 (107.64%) mengalami penurunan sebesar 39.56%. Meskipun mengalami penurunan, capaian Tahun 2017 sudah memenuhi target sampai tahun 2019 dan menaikkan status kriteria dari “Tidak dapat diterima” menjadi “Memuaskan”. Persentase ini telah memenuhi target sampai tahun 2019. Oleh karena itu perlu dilakukan review atau penyesuaian terhadap target tahunan Renstra 2015-2019 yang harus dicapai BBPOM di Banda Aceh.

Perbandingan capaian BBPOM di Banda Aceh (107.64%) dengan capaian realisasi BBPOM di Bandar Lampung (98.65%) cukup jauh. Namun masih dalam kriteria yang sama yaitu Memuaskan. Hal ini menunjukkan

pengawasan Kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh relative lebih optimal dalam melindungi masyarakat dari kosmetik yang beresiko terhadap kesehatan.

TABEL 3.4.
Perbandingan realisasi IKU 1.3. Tahun 2017 terhadap target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019

IKU 1.3	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Realisasi 2017
Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	90.00%	91.00%	92.00%	93.00%	94.00%	107.64%

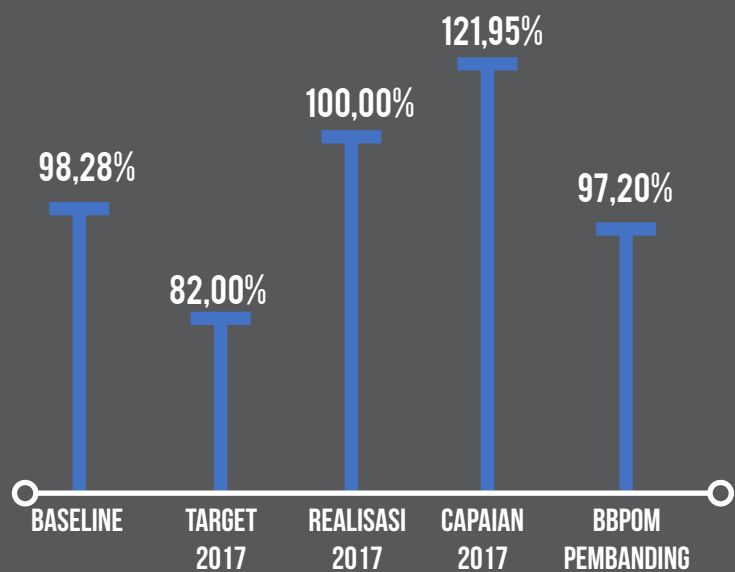
IKU 1.4. Presentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat

IKU 1.4 merupakan indikator kinerja yang bertujuan untuk mengawal mutu suplemen kesehatan sehingga yang beredar di Wilayah Aceh adalah produk suplemen kesehatan yang memenuhi syarat.

Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 100.00% dihitung dari presentase jumlah suplemen kesehatan yang memenuhi syarat Tahun 2017 (135 sampel) dibandingkan dengan jumlah suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter uji kritis Tahun 2017 (137 sampel). 2 Sampel TMS: Positif DNA Porcine

Presentase realisasi IKU 1.4. ini dibandingkan terhadap target Tahun 2017 dan target nasional seperti yang diilustrasikan dalam tabel berikut :

PERSENTASE SUPLEMEN KESEHATAN YANG MEMENUHI SYARAT



Realisasi IKU 1.4. pada Tahun 2017 (100.00%) lebih tinggi dari target Tahun 2017 (82.00%). Hal ini menunjukkan bahwa % capaian sampel suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis (121.95%) BBPOM di Banda Aceh telah memenuhi standar keamanan sehingga dapat disimpulkan capaian indikator tersebut “MEMUASKAN”. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja BBPOM di Banda Aceh telah sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM RI.

Dibandingkan dengan realisasi IKU Tahun 2016 (126.40%) maka realisasi Tahun 2017 (121.95%) mengalami penurunan sebesar 4.45%. Persentase capaian sampel suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis tahun 2017 (121.95%) terhadap target tahun 2019 (84.00%) adalah 145.17%. Persentase ini telah memenuhi target sampai tahun 2019. Oleh karena itu perlu dilakukan review atau penyesuaian terhadap target tahunan Renstra 2015-2019 yang harus dicapai

BBPOM di Banda Aceh.

Capaian persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dibandingkan dengan balai lain yang setipe yaitu BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Banda Aceh mempunyai capaian yang lebih tinggi. Namun masih dalam kriteria yang sama yaitu Memuaskan. Upaya yang dilakukan oleh kedua balai dalam mencapai target yang telah ditetapkan mempunyai kesamaan, antara lain edukasi terhadap masyarakat dan pembinaan kepada pelaku usaha.

Untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu, maka kedepannya BBPOM di Banda Aceh akan melakukan pengawasan peredaran produk secara aktif dan berkesinambungan agar peran dan manfaat Badan POM pada masyarakat, khususnya di propinsi Aceh lebih dirasakan lagi.

TABEL 3.5.

Perbandingan realisasi IKU 1.4. Tahun 2017 terhadap target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019

IKU 1.4	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Realisasi 2017
Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	80.00%	81.00%	82.00%	83.00%	84.00%	121.95%

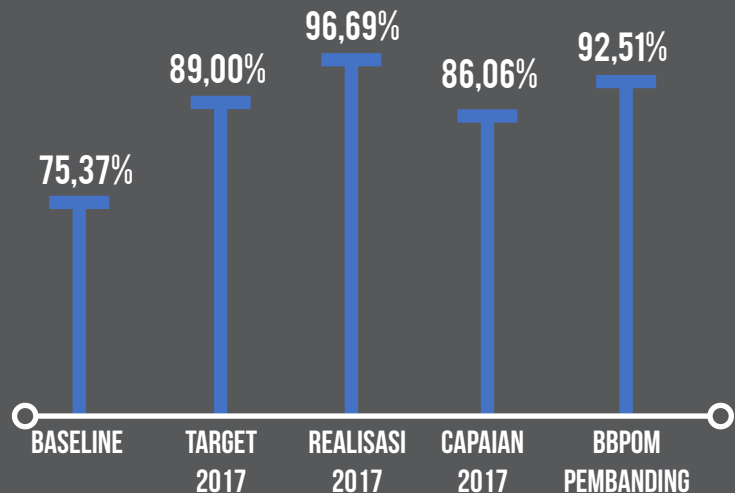
IKU 1.5. Presentase makanan yang memenuhi syarat

IKU 1.5 merupakan indikator kinerja yang bertujuan untuk mengawal makanan sehingga produk obat yang beredar dimasyarakat adalah produk suplemen kesehatan yang memenuhi syarat.

Presentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 86.06% dihitung dari presentase jumlah produk pangan yang memenuhi syarat Tahun 2017 (504 sampel) dibandingkan dengan jumlah makanan yang diuji dengan parameter uji kritis Tahun 2017 (586 sampel).

Presentase realisasi IKU 1.5. ini dibandingkan terhadap target Tahun 2017 dan target nasional seperti yang diilustrasikan dalam tabel berikut :

PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT



TABEL 3.6.

Perbandingan realisasi IKU 1.5. Tahun 2016 terhadap target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2019

IKU 1.1	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Realisasi 2017
Persentase makanan yang memenuhi syarat	88.00%	88.50%	89.00%	89.50%	90.00%	79.6%

Presentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian terhadap target tahun 2017 adalah sebesar 89.9% sehingga dapat disimpulkan capaian indikator tersebut "CUKUP". Pada indikator ini penetapan target tahun 2016 juga kurang tepat karena lebih tinggi dari baseline (75,37%) sehingga tidak bisa memperoleh nilai baik. Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2016

yaitu 62.2% maka Realisasi Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 16.7%. Dan jika dibandingkan dengan BBPOM Bandar Lampung yang mempunyai capaian Pangan memenuhi syarat sebesar 99.12%, maka BBPOM di Banda Aceh memiliki nilai lebih rendah sebesar 9.93%.

Persentase capaian tahun 2017 (86.06%) bila dibandingkan dengan target Tahun 2019 (90.00%) belum mencapai target. Oleh karena itu perlu dilakukan review atau penyesuaian terhadap target tahunan yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Banda Aceh yang tercantum dalam renstra Tahun 2016-2019.

Apabila presentase produk obat, obat tradisional,

suplemen, kosmetik dan pangan memenuhi syarat yang disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh semakin besar maka menggambarkan bahwa produk tersebut yang tidak memenuhi syarat yang beredar di Wilayah Aceh semakin sedikit sehingga dapat disimpulkan kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan telah berhasil dilakukan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2700	2723	81.80%
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	24	24	100%
	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standard	Presenstase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	88	126	85.42%
	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Presenstase cakupa pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	1242	1634	39.23%
	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah perkara obat dan makanan	10	8	80.00%

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar.

Indikator:

1. Jumlah sampel yang uji dengan menggunakan parameter kritis

Dalam rangka melindungi masyarakat Aceh dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BBPOM di Banda Aceh melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar.

Pada tahun 2017 dilakukan sampling sebanyak 2752 sampel dari target 2700 sampel dengan persentase capaian sebesar 101.92%. Seluruh sampel dilakukan pengujian menggunakan parameter kritis, namun terdapat 4 sampel rokok yang dilakukan uji rujuk ke PPOMN.

BBPOM di Banda Aceh masih perlu terus meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan terstruktur serta kredibilitas laboratoium antara lain dengan berpartisipasi dalam uji kolaborasi dan uji profisiensi.

2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik

Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) telah tercapai 100% yaitu dengan realisasi 24 sarana dari target 24 sarana IFK yang ada di setiap kabupaten kota dan milik pemerintah Aceh. Capaian sampling produk obat disektor publik (IFK) telah sesuai dengan target karena pada perencanaan diupayakan agar sampling obat di sarana Gudang di tiap Kabupaten Kota wajib di lakukan yakni pada saat melakukan perjalanan dinas untuk pemeriksaan di Kabupaten setempat.

Demikian juga terhadap satu gudang milik pemerintah Aceh. Hal ini didukung pula dengan kepatuhan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam melakukan sampling yang sesuai dengan perencanaan sampling obat disektor publik. Disamping itu obat obat yang disampling juga tersedia dalam jumlah yang cukup pada Intalasi Farmasi di setiap Kabupaten Kota.

Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) juga di dukung dengan korrdisasi yang baik antara petugas yang melakukan sampling dan pemerintah daerah terutama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Capaian ini diharapkan tetap berlanjut untuk beberapa tahun ke depan selama renstra berjalan.



Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar

Indikator :

1. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

Peningkatan kualitas sarana produksi yang memenuhi standar yang diukur dengan indikator kegiatan presentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan sebesar 87.50% yaitu 124 sarana dari 144 sarana (44 sarana yang memiliki NIE dari BPOM ditambah 100 PIRT yang high risk dengan target sebesar 63%. Nilai pencapaiannya menjadi 139%. Nilai tersebut “tidak dapat disimpulkan”, sehingga perlu adanya penyesuaian target tahun Renstra berjalan. Peningkatan tersebut karena banyak permintaan verifikasi sarana terkait pengurusan izin MD.

Peningkatan kualitas sarana produksi yang memenuhi standar yang diukur dengan indikator kegiatan presentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan sebesar % yaitu 126 sarana dari 88 sarana (44 sarana yang memiliki NIE dari BPOM ditambah 100 PIRT yang high risk dengan target sebesar 63%. Nilai pencapaiannya menjadi 143,18%. Nilai pencapaian terhadap target 2019 (63%) adalah juga sebesar 143,18% Nilai tersebut “tidak dapat disimpulkan”, sehingga perlu adanya penyesuaian target tahun Renstra berjalan

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar

Indikator :

1. Persentase cakupan sarana distribusi Obat dan Makanan

Peningkatan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar diukur dengan presentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan sebesar 131.56% (1634 sarana dari 1242 sarana) dengan target sebesar 43%. Apabila dibandingkan dengan target 2019 (43%) adalah juga sebesar 77.30%. Pencapaian indikator sarana distribusi “cukup”.

Peningkatan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar diukur dengan presentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan sebesar 131.56% (1634 sarana dari 1242 sarana sesuai target POK) dengan target sebesar 43%, Realisasi jauh melampaui target karena terdapat peningkatan pemeriksaan sarana distribusi yang significant pada saat rencana aksi kosmetikl dan intensifikasi pangan.



Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan

Indikator :**Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan**

Hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan yaitu jumlah perkara obat dan makanan sebanyak 8 perkara dari target 10 perkara. Nilai capaian indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 80%.

Kegiatan penyidikan dimulai dari perencanaan kegiatan investigasi awal, pelaksanaan investigasi awal, evaluasi investigasi awal, perencanaan penindakan, pelaksanaan penindakan dan pemberkasan.

Kegiatan penindakan dilakukan baik di dalam Kota Banda Aceh maupun Luar Kota Banda Aceh dengan melibatkan Kepolisian (Polda Aceh/Polres) dan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Kegiatan penindakan dilakukan dalam rangka Operasi Gabungan Daerah, Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Internasional (Operasi Storm, Operasi Pangea dan Operasi Opson).

Dalam melakukan penyidikan tentu dibutuhkan SDM yang berkualitas dengan jumlah yang memadai. Pada tahun 2017 ada 3 orang PPNS termasuk Kepala Seksi Penyidikan yang melakukan penyidikan ditambah 1 orang penyidik yang bertugas di seksi pemeriksaan yang juga mempunyai tugas rutin yang sangat padat. Dan pada bulan Ramadhan, seluruh pegawai di seksi penyidikan harus membantu kegiatan monitoring pangan, sehingga kegiatan penyidikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemenuhan target 10 perkara dengan 3 orang PPNS di seksi penyidikan, tentu tidak memadai dalam menyelesaikan berkas perkara dan memenuhi target penyidikan yang ditentukan pada tahun ini. Serta tambahan 4 perkara tahun sebelumnya yang juga diselesaikan pada tahun 2017. Sehingga total perkara yang ditangani pada tahun 2017 sebanyak 12 perkara.



Dalam hal peningkatan kompetensi PPNS, secara berkelanjutan PPNS BBPOM di Banda Aceh mengikuti pelatihan dan pertemuan baik yang dilaksanakan oleh Pusat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM RI juga yang dilaksanakan secara internal di BBPOM di Banda Aceh.

PPNS BBPOM di Banda Aceh terus melakukan koordinasi dengan Seksi Korwas PPNS Polda Aceh dan

Jaksa di Kejaksaan Tinggi Aceh untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Pada tahun 2017 juga diadakan Pertemuan Perkuatan Koordinasi dengan Criminal Justice System (CJS) dari 5 Kabupaten/ Kota dengan mengundang institusi Kepolisian (Polda/Polres), Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan anggota Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Dengan adanya pertemuan tersebut diharapkan terwujud persepsi yang sama dan komitmen untuk memberantas obat dan makanan ilegal di Wilayah Aceh.

Untuk meningkatkan kinerja penyidikan di tahun mendatang maka akan mengajukan usulan tambahan peserta Diklat Pembentukan dan Pelatihan PPNS sebanyak 1 orang ke Pusat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM RI, mengikuti dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi PPNS dalam hal investigasi awal dan pemberkasan. Koordinasi dengan CJS juga akan terus ditingkatkan sehingga penyelesaian berkas perkara dapat lebih cepat. Selain itu di tahun 2018 akan dilanjutkan penyempurnaan Aplikasi Mindik untuk membantu PPNS BBPOM di Banda Aceh dalam membuat administrasi penyidikan agar lebih efisien.



Pemusnahan Produk-produk ilegal, TMS

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi balai	Tingkat kepuasan masyarakat *	98.00%	87.35 %	89.13%	Baik
	Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan tahun 2017 yaitu berjumlah 15 kab/kota.	15	16	106.66%	Baik

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Realisasi tingkat kepuasan masyarakat tahun 2017 adalah sebesar 87.35%, dari target tahun 2017 sebesar 94.00%. Dari evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat diketahui bahwa ketidakpuasan masyarakat disebabkan oleh Kepastian petugas layanan (menggunakan ID Card yang menunjukkan identitas petugas) dan Kedisiplinan petugas layanan, hal ini disebabkan belum ada petugas khusus ULPK dimana semua personil bidang Serlik selain melaksanakan

tupoksinya juga memberikan layanan kepada konsumen / masyarakat yang memerlukan informasi dan pengaduan, sehingga saat konsumen datang petugas belum stanby diruangan. Untuk penyampaian informasi kepada pelanggan (customer) oleh petugas ULPK memberikan pernyataan puas sampai sangat puas. Sebagai antisipasi ketidakpuasan masyarakat kedepannya setiap personil yang bertugas tertip menggunakan ID Card.

PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Unit Pelayanan : Balai Besar POM di Banda Aceh
 Alamat : Jln. Tgk. H.M.Daud Beureueh No. 110 Lamprit Banda Aceh
 Telp./Fax : 0651 - 7411698 / 0651 - 22735

NILAI PELAYANAN																				
RESPONDEN	B1.1	B1.2	B1.3	B1.4	B1.5	B1.6	B1.7	B1.8	B1.9	B1.10	B1.11	B1.12	B1.13	B1.14	B1.15	B1.16	B1.17	B1.18	B1.19	B1.20
1	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100
3	90	90	90	100	40	40	40	40	100	90	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100
4	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
5	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100	90	100	100	100	100	100
6	100	100	100	100	90	100	90	90	100	90	90	100	100	100	90	90	90	90	90	90
7	100	100	100	100	70	100	90	20	100	90	90	90	100	90	90	90	100	100	100	100
8	100	100	100	100	100	90	100	90	100	90	100	100	100	100	100	90	90	100	100	100
9	40	30	40	40	30	70	70	70	40	40	40	90	70	50	30	70	70	40	70	90
10	90	90	90	90	40	90	90	40	100	70	100	90	70	90	90	100	90	90	90	70
Jumlah Kuisioner	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Jumlah Nilai Per- Unsur	880	870	880	890	730	850	840	710	900	840	880	940	900	900	860	920	920	900	930	930
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	88	87	88	89	73	85	84	71	90	84	88	94	90	90	86	92	92	90	93	93
Nilai IKM	88	87	88	89	73	85	84	71	90	84	88	94	90	90	86	92	92	90	93	93

Nilai Konversi IKM (Skala 1-6)	Nilai Konversi IKM (Skala 1-100)	Makna Skala / Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,00	0 – 20,00	Layanan Buruk (<i>Very Poor</i>)
2,01 – 3,00	20,01 – 40,00	Layanan Kurang Baik (<i>Poor</i>)
3,01 – 3,50	40,01 – 50,00	Layanan Biasa/Rata-Rata (<i>Average</i>)
3,51 – 4,50	50,01 – 70,00	Layanan Baik (<i>Good</i>)
4,51 – 5,50	70,01 – 90,00	Layanan Sangat Baik (<i>Very Good</i>)
5,51 – 6,00	90,01 – 100	Layanan Prima (<i>Service Excellence</i>)

Penilaian Kinerja Keseluruhan :
87,35
Layanan Sangat Baik

2. Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Realisasi Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan tahun 2017 adalah sebanyak 16 dari target tahun 2017

sebanyak 15. BBPOM di Banda Aceh telah melakukan penguatan lintas sektor melalui MoU (*Memorandum Of Understanding*) dengan 16 Kabupaten /Kota di Wilayah Aceh, tambahan Kabupaten/Kota di tahun 2017 yaitu Aceh Selatan, Pidie Jaya dan Aceh Barat Daya .

Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi balai	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Layanan Publik	555	866	156.03%
		Jumlah Komunitas yang Diberdayakan	26	26	100%



Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Indikator:

1. Jumlah Layanan Publik

Realisasi jumlah layanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2017 adalah 866 layanan (sesuai Definisi Operasional), secara keseluruhan jumlah layanan yang diberikan sudah sesuai dengan perencanaan, peningkatan jumlah layanan selain banyaknya kegiatan pameran yang diikuti juga karena tingginya permohonan pendaftaran produk baik Pangan maupun Obat Tradisional.

2. Jumlah Komunitas Yang Diberdayakan

Target yang ditetapkan untuk jumlah komunitas yang diberdayakan pada tahun 2017 adalah 26 komunitas dan realisasi capaian sejumlah 39 komunitas, yang terdiri dari: Komunitas sekolah, komunitas pasar, komunitas petani garam, komunitas PKK, IRTP, Karang Taruna, Pelaku usaha, PKL. Realisasi yang melampaui target disebabkan adanya kegiatan pengawalan terhadap desa yang telah di intervensi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) tahun 2014, 2015 dan 2016 dimana kegiatan tersebut melibatkan komunitas desa yang telah diberdayakan tahun sebelumnya.



NO	JENIS LAYANAN (555 LAYANAN)	JUMLAH	KET
1	Jasa Pendaftaran & Evaluasi		
	a. Pendaftaran	20	Rekomendasi Pangan : 16 sarana, OT : 3 sarana, SAS : 1
	b. Evaluasi CAPA dan TPTP	13	CAPA : 7 sarana, TPTP : 6 sarana
2	Jasa Inspeksi Sarana Produksi	68	DK : 22, LK : 46
3	Jasa Sertifikasi (Piagam Bintang, Label Halal, GMP dan GDP)	0	
4	Jasa Pengujian, termasuk Pihak III dan PNB	98	
5	Jasa Penilaian Produk & Evaluasi		
	a. Penilaian produk	120	
	b. Evaluasi CAPA	0	
6	ULPK	374	
7	Talkshow Radio	11	
8	Talkshow Televisi	5	
9	Iklan Layanan Masyarakat	9	
10	Bimtek Guru	7	
11	KIE OMKA untuk Masyarakat	5	
12	KIE Tomas	5	
13	KIE Pesantren	4	
14	Inisiasi di Area Pasar	19	
15	Fortifikasi	2	
16	Mobling Pasar tradisional	5	
17	Arena Massal	10	
18	Bimtek UMKM	2	
19	Penyebaran Informasi	9	
20	Sosialisasi generasi muda	2	
21	Kampanye pasar aman	1	
22	Advokasi / Tahubja	17	
23	Revitalisasi mobil lab keliling	3	
24	Pameran/karnaval	5	Pameran : 4 karnaval : 1
25	Sosialisasi Germas Sapa	7	
26	Fasilitator Keamanan Pangan	10	
27	Narasumber eksternal	35	
TOTAL LAYANAN		866	

No.	Komunitas yang Diberdayakan (26 komunitas)	Jumlah	Keterangan
1	Fortifikasi	1	Petani Garam
2	Pengawasan PJAS	25	Pengelola Kantin dan Guru UKS di 25 SD/MI
3	Pasar	9	Pengelola pasar di 8 pasar binaan (Seutui, Peuniti, Ulee Kareng, Lambaro, Peunayong, Gampong Baru, Langsa
4	Bimtek UMKM	1	Pelaku usaha pangan
5	GKPD	3	PKK, Karang Taruna, Guru, IRTP, Ritel, PKL, PKL/DFI, Mahasiswa di desa Meunasah Blang, Meunasah Dayah dan Cot Batee Kab. Bireun
Total Layanan		39	

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya kualitas kelembagaan Balai Besar POM di Banda Aceh	Nilai SAKIP	A	B	81.29%	Cukup

Realisasi nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2016 adalah 67.66 (kategori B), mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 2.08 % (69.10) di sebabkan karena data yang disajikan dalam Laporan Kinerja 2016 belum akurat. Target nilai SAKIP Balai Besar POM Banda Aceh sampai dengan tahun 2019 adalah B+ (79.00).

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Balai Besar POM di Banda Aceh, melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mereviu, monitoring dan evaluasi data hasil pencapaian kinerja pada tahun berjalan.
2. Pengelolaan keuangan yang efektif, Efisien dan Akuntabel

Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas kelembagaan Balai Besar POM di Banda Aceh	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standard	85.00	62.31%	73.30%
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang Dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100.00%



REMBUK NASIONAL 2017

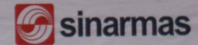
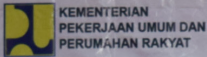
"Membangun Untuk Kesejahteraan Rakyat"



BIDANG REMBUK 5

MENUJU INDONESIA YANG BERDAULAT ATAS PANGAN Standar dan Keamanan Pangan

Universitas Syiah Kuala - Aceh, 16 Oktober 2017



Sasaran Kegiatan :

Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator :

Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar

Realisasi pemenuhan sarana prasarana (sarpras) tahun 2017 sebesar 62.31% dari target 85%. Dengan total sarpras yang dimiliki sebanyak 177 unit (sarpras kerja 129 unit dan sarpras alat laboratorium 48 unit). Target pemenuhan sarpras tahun 2019 adalah 89.00%. Persentase capaian terhadap target tersebut sebesar 84.77%.

Anggaran untuk sarpras BBPOM di Banda Aceh tahun 2017 sebesar Rp. 5.542.111.000,-. anggaran ini mengalami kenaikan Dibanding tahun 2016 sebesar Rp.3.364.630.900,-. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan sarpras yang harus dipenuhi di BBPOM Banda Aceh.

Sasaran Kegiatan :

Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu

Indikator :

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu

Penyusunan, perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu diukur dengan indikator kegiatan jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 10 dokumen, meliputi :

- » Perjanjian Kinerja Tahun 2017
- » RKAKL/DIPA tahun 2018
- » Laporan Kinerja tahun 2016
- » Laporan triwulanan I Tahun 2017
- » Laporan triwulanan II Tahun 2017
- » Laporan triwulanan III Tahun 2017
- » Laptah Tahun 2016
- » Laporan Keuangan Tahun 2016
- » Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2017
- » Reviu Renstra Balai

Persentase capaian terhadap target tahun 2017 sebesar 100%. Sedangkan untuk persentase capaian terhadap target tahun 2019 sebesar 100% dengan 10 dokumen (termasuk Reviu RENSTRA). Perbandingan realisasi tahun 2017 terhadap tahun 2016 adalah 100%.

Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2017,

telah melakukan reviu terhadap target indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Balai. Reviu terhadap target indikator dilakukan berdasarkan realisasi capaian indikator pada tahun sebelumnya dan prediksi untuk tahun berikutnya hingga tahun akhir Renstra periode 2015-2019. Dengan table tools reviu seperti dibawah ini :

TOOLS REVIEW INDIKATOR RENSTRA 2015-2019

NO	SASARAN	SEMULA										USULAN PERUBAHAN							
		INDIKATOR		TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		IDENTIFIKASI MASALAH DAN KENDALA PELAKSANAAN	SOLUSI	INDIKATOR	TARGET					ASUMSI	RISIKO
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				(11)	(12)					
1	Menguatnya Sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97.00	97.50	99.00	107.99	99.00	102.06	110.67	101.50		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00		
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi Syarat	78.00	79.00	87.30	99.81	87.30	111.91	125.57	102.30		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi Syarat	78.00	79.00	80.00	80.00	82.00		
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90.00	91.00	95.00	94.99	95.00	106.61	107.76	60.60		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00		
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80.00	81.00	96.00	126.98	121.15	156.05	120.10			Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00		
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	88.00	88.50	90.00	86.78	86.70	89.15	97.30			Persentase makanan yang memenuhi syarat	88.00	88.50	89.00	89.50	90.00		
2	Meningkatnya Kemardirian Pelaku Usaha, Kermitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	98.00	98.00	98.16	82.82	88.35	88.93	84.03	84.00		Tingkat Kepuasan Masyarakat	98.00	98.00	98.00	85.75	86.00		
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6	10	23	15	16	100.00	100.00	106.70		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6	10	15	18	20		
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Banda Aceh	Nilai SAKIP dari Badan POM	A	A	A	69.72	67.44	85.22	81.29	79.60		Nilai SAKIP dari Badan POM	A	A	B	B	B		
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Banda Aceh																			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2500	2500	2500	2045	2752	64.40	81.80	101.90		Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2700	2700	2700	2700	2700		
		Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100	100	100	162.5	100	100.00	58.58	100.00		Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)							
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	63	63	63	139.70	143.10	18.06	86.81	227.14		Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	88	88	88	88	88		
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	43	43	43	124.30	131.50	87.81	39.63	305.8		Cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	1242	1242	1242	1650	1650		

3.3.

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2017 Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh anggaran sebesar Rp. 23.238.148.000.-, dan mengalami penghematan (*Self Blocking*) sebesar Rp. 990.739.000, sehingga anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan sebesar Rp. 22.247.409.000.-

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.20.485.814.181 mengalami peningkatan dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami peningkatan sebesar 9,83 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena

1. Meningkatnya anggaran belanja barang
2. Pengadaan barang dan jasa dilakukan tepat waktu



Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016

Uraian	Realiasi TA 2017	Realisasi TA 2016	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai (51)	5.051.879.193	5.083.115.982	-0.61
Belanja Barang (52)	10.099.412.088	9.492.818.456	6.39
Belanja Modal (53)	5.334.525.900	4.076.886.300	30.85
Jumlah	20.485.814.181	18.625.820.738	9.83

9,83%
Peningkatan
Realisasi Belanja TA 2017

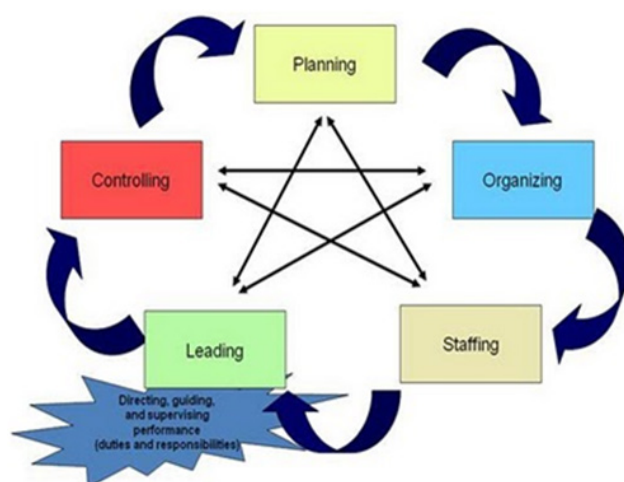
Realisasi anggaran tahun 2016 (Rp.18.652.820.738). mengalami kenaikan jika dibanding realisasi anggaran tahun 2017 (Rp. 20.485.814.181) sebesar 9.83%, Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan .

3.3.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2017 adalah Rp 200.000.000,-. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp.35.697.265,- terdiri dari pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan

pemerintah adalah Rp 3.036.687,-, Penerimaan kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 1.260.578,-, Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp. 31.400.000,-

NO	Uraian	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
1	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	200,000,000	31,400,000	0,63
2	Pendapatan denda keterlambatan pekerjaan pemerintah		3,036,687	
3	Penerimaan kembali belanja TAYL		1,260,578	15,70
Jumlah		200,000,000	35,697,265	17,85



3.4

Analisis Efisiensi Kegiatan

3.4.1 Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja

Pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh sifatnya masih berdasarkan angka bukan realisasi yang dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam hal tingkat efisiensi anggaran berdasarkan capaian output kegiatan utama, maka berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut : *(lihat halaman selanjutnya)*

Dengan kriteria yang mengatakan bahwa suatu kegiatan dinyatakan efisiensi apabila nilai

$$IE \geq 1,00$$

maka berdasarkan Tabel 3.7, dapat dilihat bahwa, dari 15 kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2017, diperoleh seluruh kegiatan telah dilakukan secara efisien. Hal ini perlu dipertahankan guna menjaga konsistensi pencapaian anggaran tahun berikutnya.

TABEL 3.7. Capaian Output Utama Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN	SATUAN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI	
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI 33 BALAI BESAR/BALAI POM								
		Sampel Obat KB yang diuji dengan Parameter Kritis	Input	15,107,000	11,532,000	2.01	1	1.01	EFISIEN	
			Output	32	32					
		Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input	773,134,000	531,513,000	1.20	1	0.20	EFISIEN	
			Output	10	10					
		Sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis	Input	538,859,000	470,571,000	1.15	1	0.15	EFISIEN	
			Output	771	771					
		Cakupan pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	Input	70,583,000	60,503,000	1.47	1	0.47	EFISIEN	
			Output	88	88					
		Cakupan pengawasan Sarana distribusi Obat dan Makanan	Input	1,765,929,000	1,379,654,000	1.47	1	0.47	EFISIEN	
			Output	1,242	1,242					
		Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan yang di tangani	Input	612,702,000	279,787,000	1.00	1	0.00	EFISIEN	
			Output	1	1					
Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Input	1,858,826,000	1,853,216,000	1.03	1	0.03	EFISIEN			
	Output	1	1							
Sampel Obat yang diuji dengan parameter kritis	Input	898,996,000	824,400,000	1.05	1	0.05	EFISIEN			
	Output	1,897	1,897							

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN	SATUAN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI		
2	Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Layanan Publik BB/BPOM	Input	1,575,584,000	1,488,764,000	1.79	1	0.79	EFISIEN		
			Output	555	555						
		Komunitas yang diberdayakan	Input	1,252,733,000	1,063,923,000	1.12	1	0.12	EFISIEN		
			Output	26	26						
3	Meningkatnya Kualitas kelembagaan BPOM	Sarana Prasarana sesuai standar	Input	549,083,000	617,884,000	1.00	1	0.00	EFISIEN		
			Output	1	1						
		Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Input	1,058,295,000	1,049,471,000	1.19	1	0.19	EFISIEN		
			Output	10	10						
		Alat Laboratorium yang diadakan	Input	4,152,000,000	4,398,932,000	1.02	1	0.02	EFISIEN		
			Output	8	9						
		Layanan Internal (Overhead)	Input	424,353,000	525,295,000	1.00	1	0.00	EFISIEN		
			Output	1	1						
		Layanan Perkantoran	Input	7,691,964,000	7,691,964,000	1.07	1	0.07	EFISIEN		
			Output	12	12						
		Jumlah Total				23,238,148,000	22,247,409,000				
				Dana							

BAB - IV

PENUTUP







Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah merupakan unit mandiri dan sesuai dengan Inpres nomor 7 tahun 1999 wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Laporan ini disusun sebagai upaya memaparkan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, sehingga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan serta derajat keberhasilan kinerja dapat diungkapkan, dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan dalam melakukan evaluasi guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Dalam rencana jangka menengah (RPJM) Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2015-2019 telah menetapkan 5 indikator kinerja utama (IKU), dengan capaian untuk Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Presentase obat yang memenuhi syarat yaitu 99.5% (Baik).
2. Presentase obat tradisional yang memenuhi syarat yaitu 81.8%. (Baik).
3. Presentase Kosmetik yang memenuhi syarat yaitu 99.0% (Baik).
4. Presentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat yaitu 98.5%. (Baik)
5. Presentase Makanan yang memenuhi syarat yaitu 86.6% (Baik)



Dalam hal pencapaian sasaran strategis Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh capaian sebagai berikut :

1. Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan yaitu 114.20% (Memuaskan)
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat yaitu 95.35% (Cukup)
3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM yaitu 74.97% (Cukup)

Dari pengukuran yang dilakukan terhadap kinerja tahun 2017, dapat disimpulkan:

1. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2017. Namun perlu dilakukan evaluasi terhadap target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis 2015-2019.
2. Dengan pencapaian kinerja seperti yang telah diuraikan di atas pencapaian sasaran kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh telah tercapai seperti yang telah diharapkan. Namun terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.



BADAN POM RI

BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
DI BANDA ACEH



BADAN POM RI



LAPORAN KINERJA (LAKIN) 2017

Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh no.110 Banda Aceh 23126.
Telp : (0651) 7411698-23926-22735
Fax : (0651) 22735.
Email : serliknad@yahoo.com – bpom_aceh@pom.go.id.

Copyright © 2018 | BADAN POM di Banda Aceh

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDA ACEH